

Mardiasmo, Kepala BPKP:

Kami Bukan Watchdog yang Mencari Kesalahan

Sejak reformasi birokrasi bergulir, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pun jadi mutlak diperlukan. Masyarakat harus mengetahui bagaimana dan untuk apa saja pemanfaatan uang pajak yang mereka setorkan kepada negara. Di sinilah, peran badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) menjadi vital sebagai auditor internal pemerintah.

Memang, BPKP sebagai lembaga auditor internal pemerintah tak lagi melakukan audit dengan memberikan opini layakny Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Makanya, Mardiasmo, yang baru menjabat sebagai Kepala BPKP sejak Juni 2010, harus menjadi motor reposisi lembaga ini.

Nah, apa saja peran dan tugas BPKP tersebut? Dengan gamblang, mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini menjelaskannya kepada wartawan KONTAN, Herry Prasetyo dan Arief Ardiansyah, Jumat (24/10) lalu di kantornya. Berikut petikannya:

Kontan: Apa fokus tugas Anda sebagai Kepala BPKP yang baru?

Mardiasmo: *Pertama*, kami harus berkomunikasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda). *Kedua*, Presiden meminta kami fokus kepada kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran besar untuk pengadaan barang dan jasa. *Ketiga*, kami harus membantu pejabat pemda, terutama yang jauh dari pusat, dalam pengelolaan keuangan daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundangan itu. *Keempat*, kami harus banyak berkomunikasi dengan aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Presiden minta optimalisasi APIP di kementerian, lembaga, dan pemda. *Kelima*, persiapan pembentukan arsitektur pengawasan keuangan negara terus digalakkan.

Kontan: Apa langkah konkret yang Anda lakukan?

Mardiasmo: Saya dilantik 15 Juni 2010. Esoknya, saya langsung menyiapkan penguatan akuntabilitas keuangan negara. Saya membuat pedoman teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Di situ, Wakil Presiden mengarahkan dan saya sudah elaborasi bahwa SPIP ini menjadi tulang punggung reformasi birokrasi. SPIP ini menjadi landasan BPKP untuk bekerja. Karena itu, produk pertama yang saya buat sebagai Kepala BPKP adalah membuat abstraksi terhadap SPIP tersebut supaya mudah dipahami.

Kontan: Apa tujuan SPIP?

Mardiasmo: *Pertama*, agar organisasi berjalan efisien dan efektif. *Kedua*, laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. *Ketiga*, pengamanan aset negara. *Keempat*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Ini yang namanya 2K3E, yaitu ketaatan, keuangan, ekonomis, efektif, dan efisien.



Kontan: Apa poin penting dari abstraksi tersebut?

Mardiasmo: SPIP memiliki dua dasar utama berupa penguatan kualitas akuntabilitas keuangan negara dan tulang punggung reformasi birokrasi. Nah, salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan negara adalah reformasi birokrasi. Jadi, semua birokrat, baik di kementerian, lembaga, pemerintah pusat, dan pemda, atau singkatnya semua aparatur negara harus direformasi mindset dan kulturnya supaya kembali ke jati dirinya.

Kontan: Apa peran BPKP?

Mardiasmo: Peran BPKP di sini sebagai quality assurance dari reformasi dari reformasi birokrasi. Pak wapres ingin reformasi birokrasi benar-benar dilaksanakan, bukan hanya retorika tanpa ada yang menjamin pelaksanaannya. Sehingga, peran BPKP dengan reposisi dan revitalisasi terkini adalah agar tiap kementerian, lembaga, termasuk BPKP, dan pemda menjadi good public governance, yang di dalamnya terkandung reformasi birokrasi. Karena itu, tanggung jawab BPKP adalah dalam upaya-upaya pencegahan atau preventif

Kontan: Apa konkretnya?

Mardiasmo: *Pertama*, BPKP menjadi dokter yang harus langsung mengobati karena ada kondisi tidak sehat. Jadi harus langsung action. Action-nya itu bisa audit, evaluasi, dan pemantauan. Audit hanya audit kinerja dan tujuan tertentu, bukan audit untuk memberi opini, karena itu ada di tangan BPK. Supaya tidak terjadi duplikasi dengan aparat lain, karena di kementerian ada inspektorat jenderal, di daerah ada inspektorat provinsi ataupun kabupaten, yang dilakukan BPKP lebih pada kegiatan lintas sektoral, yang ditangani oleh lebih dari satu lembaga atau kementerian. Kegiatan lain ialah kebendaharaan umum negara berdasar penetapan Menkeu sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Ini juga lintas sektoral. Ada juga kegiatan lain berdasar penugasan dari presiden. *Kedua*, lebih banyak tindakan preventif. Selain mengobati, BPKP juga bertindak agar pasien tidak terkena penyakit yang sama. Kami memberi pedoman teknis SPIP seperti ilmu kesehatan untuk mengendalikan suatu organisasi, baik kementerian, lembaga, atau pemda.

Kontan: Seperti apa langkah untuk pencegahan itu?

Mardiasmo: Kami memberikan pendidikan dan pelatihan. Kami punya pusdiklat yang cukup bagus di Ciawi, Bogor. Kami berikan diklat untuk sekretariat jenderal kementerian atau lembaga maupun sekretariat daerah. Inspektorat-inspektorat juga kami bina, seiring posisi BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. Nah penyelenggaraan itu melalui membuat pedoman teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan, dan konsultasi, termasuk peningkatan auditor APIP.

Kontan: Cukup dengan sosialisasi saja?

Mardiasmo: Selanjutnya adalah pemetaan. Setiap kementerian atau lembaga memiliki titik-titik rawan yang tidak sama satu sama lain. Karena itu, saya mengeluarkan buku pedoman pemetaan. Target BPKP 2010, setiap perwakilan minimal memetakan dua instansi. Setiap pemda juga minimal dipetakan dua kotak eselon. Kami lebih pada usaha mendiagnosis penyakit di seluruh instansi. Lalu, supaya lebih serius, wujud adanya political will dan keinginan yang sama berupa adanya MoU atau nota kesepahaman. Sejak jadi kepala BPKP, saya telah membuat MoU dengan delapan kementerian lembaga yang masih mendapat opini disclaimer dari BPK.

Kontan: Siapa saja kementerian yang masih mendapat opini disclaimer dari BPK?

Mardiasmo: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, kementerian Lingkungan Hidup, kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Pertanahan Nasional. Kalau Kementerian Keuangan hanya satu yang mendapat disclaimer, yaitu penerusan pinjaman luar negeri, jadi tidak semuanya. Dari delapan instansi ini, kami belum melakukan MoU dengan MA. Mudah-mudahan dalam waktu dekat.

Kontan: Kok, bisa belum?

Mardiasmo: Kami sudah menghubungi MA, tapi mungkin mereka masih sibuk. Ya sudah, kami kan cuma membantu. Yang harus dimengerti, BPKP sudah melakukan reposisi dan revitalisasi yang menjadikan BPKP sebagai assistant consulting. Bukan watchdog yang mencari kesalahan, apalagi menjebak. BPKP lebih memberikan langkah pencegahan, memberikan advis. Kalau dikasih pendampingan tak mau, ya, sudah, bukan tanggungjawab kami. Yang bertanggungjawab terhadap laporan keuangan adalah yang melakukan. Kami cuma mendampingi.

Kontan: Apa saja bentuk pendampingan tersebut?

Mardiasmo: Kami berikan asistensi kepada kementerian, lembaga, dan pemda. Banyak juga akuntan BPKP yang kami pekerjakan di pemda dan inspektorat. Ada 230 orang dari 6.000 pegawai kami yang kami pekerjakan di 714 unit, baik di pusat maupun di daerah.

Kontan: Ada hasilnya?

Mardiasmo: Ya. Kementerian Kehutanan, misalnya, dari disclaimer ke wajar dengan pengecualian (WDP), demikian pula Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu, Kementerian Perdagangan, dari WDP ke wajar tanpa pengecualian (WTP). BPS dari disclaimer ke WDP.

Kontan: Tapi, laporan keuangan pemda masih banyak yang buruk?

Mardiasmo: Nah, ini yang akan kita usahakan. Selain mengoptimalkan inspektorat dengan adanya joint audit, kami juga membina SDM. Banyak auditor di inspektorat yang bukan akuntan. Ini yang kami fasilitasi. Contohnya, sampai dengan tahun anggaran 2009, dari 15 pemda yang mendapat opini WTP dari BPK, 13 pemda mendapat pendampingan dari BPKP. Ada 26 pemda yang meningkat ke WDP, 24 diantaranya didampingi oleh BPKP.

Kontan: Apakah sudah cukup memuaskan?

Mardiasmo: Ada keberhasilan, tapi kami masih belum puas. Saya tak ingin BPKP hanya sebagai lembaga konsultan WTP. Itu memang langkah besar. Tapi langkah lebih besar lagi yang ditunggu rakyat sebagaimana arahan Presiden bahwa WTP itu persyaratan minimal, bukan pencapaian tertinggi. Kontrak presiden dengan para menteri, kan, WTP pada tahun 2012. Ini minimal. Selanjutnya adalah kinerja. Tidak mungkin kinerja cemerlang tapi laporan keuangan babak belur. Harapannya, selain WTP, bagaimana kinerja organisasi yang efektif dan efisien.

Kontan: Apa langkah BPKP selanjutnya?

Mardiasmo: Kemarin, kami sudah minta Menkeu dan masing-masing kementerian atau lembaga, kalau bisa reviuw laporan keuangan sebelum disubmit ke Kementerian Keuangan, sebagai BUN, untuk dikonsolidasikan, supaya terlebih dahulu bisa kami review. Kedua, supaya laporan keuangan 2010 yang

dirilis di 2011 nanti lebih bagus, kami minta review dari awal, yakni di pertengahan tahun ini. Tidak sekaligus di ujung, karena kalau di ujung waktunya sudah terlalu mepet. Menkeu sudah setuju.

Kontan: Bagaimana soal audit lintas sektoral?

Mardiasmo: Sekarang sudah berjalan. Dan ada beberapa temuan. Pertama, ada kesalahan administrasi. Kami sudah merekomendasikan untuk diperbaiki. Tapi, kalau ada kesalahan dan ada tindak pidana korupsi, maka akan kami teruskan ke investigasi. Kami tidak semata-mata langsung memberikan penilaian karena kami juga harus berhati-hati. Biasanya, kami menginvestigasi atas permintaan penegak hukum apakah KPK, jaksa, atau polisi. Kalau ada masalah terus ada korupsi, kita diminta menghitung potensi kerugian negara.

Kontan: Soal penyerapan anggaran yang lambat, apa yang dilakukan BPKP?

Mardiasmo: Kami juga diminta presiden untuk melihat simpul-simpul penyebab keterlambatan penyerapan anggaran. Terlambat dalam penyusunannya, atau apa. Salah satu yang kami lakukan adalah menyusun laporan keuangan berbasis komputer. Biasanya, kalau penyusunan laporan keuangan cepat selesai, APBD akan tepat waktu, dan APBD berikutnya akan cepat. Tapi kalau APBD terlambat, semua jadi terlambat. Karena itu, supaya penyerapan anggaran bagus, maka penyusunan APBD jangan sampai terlambat. Supaya APBD tidak terlambat, laporan keuangan tahun sebelumnya juga jangan sampai terlambat. Itulah sebabnya, kami minta teman-teman perwakilan supaya review dilakukan pertengahan tahun.

Sehat dengan Canda

Biasanya, kesan yang muncul dari pengawas internal adalah sedikit bicara. Tapi kesan itu hilang saat bertemu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo yang suka bercanda.

Salah satu guyonan Mardiasmo adalah gelar yang diberikan buat pengawas internal yang lulus dari Pusdiklat BPKP di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. "Mereka bergelar MSC, Master Saking Ciawi," kata Mardiasmo.

Sejak aktif di pemerintahan, tepatnya di Kementerian Keuangan, Mardiasmo terkenal mahir beberapa jenis olahraga. Dia memang hobi bermain tenis meja dan bola voli. "Sekarang olahraga saya tinggal jalan kaki dan senam. Soalnya, kalau tenis meja di BPKP, enggak ada yang bisa mengalahkan saya," katanya, berseloroh.

Riwayat Pendidikan:

- a. 1977-1981, Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Univ. Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.
- b. 1988-1989, Master of Business Administration, University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat.
- c. 1959-1999, Doctor of Philosophy (PhD), School of Public Policy, University of Birmingham, Inggris.

Riwayat Pekerjaan:

- a. 1983-kini, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM
- b. 2003-2006, Staf Ahli Menteri Keuangan

- c. 2006-2010, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
- d. 2010-kini, Kepala BPKP.